



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENGELOLAAN TERPADU TAMAN NASIONAL
DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
TAHUN 2018 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pembangunan nasional diperlukan dukungan sumber daya alam dan pengelolaan kawasan konservasi yang efektif dengan orientasi dukungan pertumbuhan wilayah;
 - b. bahwa terdapat masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan konservasi yang perlu diberdayakan perekonomiannya dengan berpijak pada prinsip pelestarian alam;
 - c. bahwa masih terdapat kawasan yang cukup luas dan potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan konservasi perairan yang bermanfaat bagi pembangunan nasional sekaligus memerlukan dukungan upaya pelestarian alam;
 - d. bahwa untuk pengembangan potensi dan peningkatan efektivitas pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi perairan nasional, perlu disusun Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025;

e. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 5. Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGELOLAAN TERPADU TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL TAHUN 2018-2025.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018-2025 yang selanjutnya disebut Rencana Aksi.
- (2) Rencana Aksi menjadi pedoman bagi semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta menjadi acuan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi memuat program dan kegiatan untuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk periode 8 (delapan) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan 2025, termasuk kegiatan penyusunan rencana induk mengenai pembangunan kawasan konservasi dalam lingkup pembangunan nasional.

(2) Strategi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

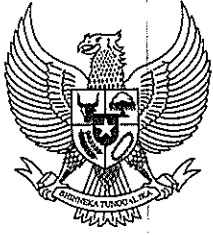
- 5 -

- (2) Strategi dalam Rencana Aksi meliputi:
- a. penguatan kinerja pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang efektif;
 - b. pengembangan peran Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional dalam mendukung pariwisata;
 - c. peningkatan peran masyarakat dan para pihak di sekitar Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional;
 - d. pengembangan mekanisme pendanaan berkelanjutan; dan
 - e. pengembangan kawasan konservasi perairan baru.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (4) Rencana Aksi Tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kematriman.
- (6) Rencana induk ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 3

Rencana Aksi dilaksanakan di 17 (tujuh belas) lokasi yang terdiri atas:

- a. 7 (tujuh) Taman Nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu:
 1. Taman Nasional Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta;
 2. Taman ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. Taman Nasional Karimunjawa, Provinsi Jawa Tengah;
 3. Taman Nasional Bunaken, Provinsi Sulawesi Utara;
 4. Taman Nasional Kepulauan Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 5. Taman Nasional Taka Bonerate, Provinsi Sulawesi Selatan;
 6. Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
 7. Taman Nasional Kepulauan Togean, Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. 10 (sepuluh) Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu:
1. Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Taman Wisata Perairan Pulau Pieh, Provinsi Sumatera Barat;
 3. Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang, Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. Taman Wisata Perairan Gili Matra, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 5. Taman Wisata Perairan Laut Banda, Provinsi Maluku;
 6. Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido, Provinsi Papua;
 7. Taman Nasional Perairan Laut Sawu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 8. Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat, Provinsi Papua Barat;

9. Suaka ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

9. Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat; dan
10. Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara, Provinsi Maluku.

Pasal 4

- (1) Menteri/pimpinan lembaga merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi Rencana Aksi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (3) Pelaksanaan Rencana Aksi pada masing-masing kementerian/lembaga diatur lebih lanjut oleh menteri atau pimpinan lembaga, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 5

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 6

- (1) Rencana Aksi diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode berikutnya.

(2) Rencana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Rencana Aksi dapat ditinjau kembali secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Aksi dilakukan oleh kementerian/lembaga dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (4) Hasil peninjauan kembali dapat dijadikan dasar penyesuaian Rencana Aksi.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 151

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kemaritiman,



Agustina Murbaningsih
Agustina Murbaningsih



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENGELOLAAN TERPADU TAMAN NASIONAL
DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL TAHUN 2018-2025

RENCANA AKSI NASIONAL PENGELOLAAN TERPADU TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL TAHUN 2018-2025

STRATEGI 1. PENGUATAN KINERJA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL YANG EFEKTIF

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi terkait Pengelolaan Kawasan Konservasi	Penyusunan regulasi tentang standar infrastruktur pengelolaan kawasan konservasi per lokasi/wilayah	Standardisasi infrastruktur pengelolaan kawasan konservasi	1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP)		1								Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Pemerintah Daerah (Pemda)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Penyusunan ketentuan standar-disasi pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi	Tersedianya ketentuan standar-disasi pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi	1 Permen KP		1							KKP	KLHK
		Penyusunan regulasi tentang standar tanda batas dan fungsi keselamatan pelayaran di kawasan konservasi perairan	Standardisasi tanda batas dan fungsi keselamatan pelayaran di kawasan konservasi perairan	1 Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub)		1							Kementerian Perhubungan (Kemenhub)	KLHK, KKP
		Penyusunan rencana induk pembangunan dan pengelolaan kawasan konservasi	Tersedianya rencana induk pembangunan dan pengelolaan kawasan konservasi periode 25 tahun	1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman		1							Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim)	KLHK, KKP, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Na-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														sional (KemenPPN/ Bappenas), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
2.	Penataan dan Pemeliharaan Batas Kawasan	Integrasi peta kawasan dan zonasi Taman Nasional (TN) dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) ke dalam Peta Lingkungan Pantai Indonesia	Tersedianya peta kawasan dan zonasi TN dan KKPN yang terintegrasi ke dalam Peta Lingkungan Pantai Indonesia	1 Peta Lingkungan Pantai Indonesia yang memuat kawasan dan zonasi 7 TN dan 10 KKPN	1	1 <i>updating</i>	1 <i>updating</i>	1 <i>updating</i>	1 <i>updating</i>	1 <i>updating</i>	1 <i>updating</i>	1 <i>updating</i>	Badan Informasi Geospasial (BIG)	KKP, KLHK, Kemenhub, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Pus-hidrosal), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-4-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Penyusunan Peta Laut Internasional dan Peta Laut Indonesia yang memuat kawasan dan zonasi	Tersedianya Peta Laut Internasional dan Peta Laut Indonesia yang memuat kawasan dan zonasi	1 Peta Laut Internasional sesuai ketentuan <i>International Hydrographic Organization</i> (IHO) yang memuat kawasan dan zonasi di TN dan KKPN dan diperbarui secara berkala	6 TN Bunken, Togeana, Karimunjawa, Cendrawasih, Taka Bonerate, Wakatobi		2 TN Karimunjawa, Kep. Seribu	2 TN Cendrawasih, Wakatobi	3 TN Togeana, Bunken, Taka Bonerate	1 TN Togeana			Pushidrosal	KKP, KLHK, Kemenhub, BIG, BPPT
				6 KKPN Raja Ampat, Aru, Waigeo, Laut Sawu, Padaido, Banda			3 KKPN Raja Ampat, Gili Matra, Laut Sawu	3 KKPN Anambas, Kapoposang, Banda	4 KKPN Pieh, Waigeo, Padaido, Aru	2 KKPN Anambas, Kapoposang	2 KKPN Banda, Padaido	2 KKPN Pieh, Laut Sawu		
		Penataan dan pemasangan rambu-rambu laut di sekitar dan di dalam kawasan TN dan KKPN	Meningkatnya keselamatan dan keamanan perairan laut di sekitar dan di dalam Kawasan TN dan KKPN	Rambu-rambu laut di sekitar dan di dalam kawasan 7 TN dan 10 KKPN			2 TN Karimunjawa, Kep. Seribu	2 TN Cendrawasih, Wakatobi	3 TN Togeana, Bunken, Taka Bonerate				Kemenhub	KKP, KLHK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
							3 KKPN Raja Ampat, Gili Matra, Laut Sawu	3 KKPN Anambas, Kapoposang, Banda	4 KKPN Pieh, Waigeo, Padaido, Aru						ESDM), Badan Keamanan Laut (Bakamla)
		Kajian pembangunan tambat kapal/ <i>mooring buoy</i> dan labuh jangkar	Tersedianya kajian pembangunan tambat kapal/ <i>mooring buoy</i> dan labuh jangkar di 7 TN dan 10 KKPN	1 dokumen kajian di masing 7 TN dan 10 KKPN			3 TN Karimunjawa, Kep. Seribu, Wakatobi	3 TN Bunken, Cendrawasih, Taka Bonerate	1 TN Togean				Kemenhub	KKP, KLHK, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), LIPI, BIG, Pushidrosal, Pemda	
							2 KKPN Gili Matra, Waigeo	2 KKPN Raja Ampat, Aru	2 KKPN Anambas, Kapoposang	2 KKPN Banda, Padaido	2 KKPN Pieh, Laut Sawu				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Pembangunan tambat kapal/ <i>mooring buoy</i> dan labuh jangkar	Tersedianya tambat kapal/ <i>mooring buoy</i> dan labuh jangkar di 7 TN dan 10 KKPN	17 tambat kapal/ <i>mooring buoy</i> dan labuh jangkar di 7 TN dan 10 KKPN				3 TN Karimun Jawa, Kep. Seribu, Wakatobi	3 TN Bunaken, Cendrawasih, Taka Bonerate	1 TN Togean			Kemenuh	KKP, KLHK Kemenpar, Pushidrosal, Pemda
								2 KKPN Gili Matra, Waigeo	2 KKPN Raja Ampat, Aru	2 KKPN Anambas, Kapoposang	2 KKPN Banda, Padaido	2 KKPN Pieh, Laut Sawu		
		Percepatan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) di 8 provinsi yang memiliki TN dan/ atau KKPN dan penetapan sebagai kawasan konservasi/ lindung	Tersedianya peraturan daerah tentang RZWP-3-K di 8 provinsi yang memiliki TN dan/ atau KKPN dan ditetapkan sebagai kawasan konservasi/ lindung	8 Peraturan Daerah (Perda) RZWP-3-K	6 DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kep. Riau, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku	2 Papua, Papua Barat							Pemda Provinsi	Kemenko Maritim, KKP, Kemendagri, KLHK, Kemenhub, BIG, Pushidrosal, Pemda Kabupaten /Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
3.	Perlindungan dan Penegakan Hukum Kawasan	Mewujudkan penegakan hukum terhadap perusakan dan pencemaran sumber daya alam	Meningkatnya penegakan hukum terhadap perusakan dan pencemaran sumber daya alam	Minimal 75% penyelesaian kasus hukum (status P-21) di 7 TN dan 10 KKPN per tahun	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	KLHK, KKP	Kemenko Maritim, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)
		Sosialisasi bersama tentang ketentuan pemanfaatan ruang perairan TN dan KKPN	Terselenggaranya sosialisasi bersama tentang ketentuan pemanfaatan ruang perairan TN dan KKPN	2 kegiatan sosialisasi di TN dan KKPN per tahun	2	2	2	2	2	2	2	2	2	KLHK, KKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Pembentukan Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP)/Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang akan dilibatkan dalam patroli keamanan kawasan	Terbentuknya MMP/Pokmaswas	22 kelompok MMP (220 orang) di 7 TN dan 70 Pokmaswas (700 orang) di 10 KKPN	22 MMP	20 Pokmaswas	20 Pokmaswas	20 Pokmaswas	10 Pokmaswas				KLHK, KKP	Pemda
		Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan kawasan konservasi	Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan kawasan konservasi	10 kapal, 10 speedboat, 8 radar pantai, 2 radar satelit		5 kapal, 5 speedboat, 4 radar pantai, 1 radar satelit	5 kapal, 5 speedboat, 4 radar pantai, 1 radar satelit						KKP	Kemhub, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), TNI AL
4.	Penataan Kelembagaan Pengelola dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Pembentukan lembaga pengelola di KKPN	Terbentuknya 10 Unit Pengelola Teknis (UPT) konservasi untuk mengelola 10 KKPN	10 UPT Konservasi	10 UPT								Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)	KKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Mendorong penambahan jumlah SDM Pengelola di 10 KKPN	Bertambahnya jumlah SDM Pengelola di 10 KKPN	245 orang pengelola dan 30 Polisi Khusus (Pol-sus)/Pengawas Perikanan di 10 KKPN	100 Pengelola	100 Pengelola dan 30 Polsus	45 Pengelola						KemenPANRB	KKP
		Mendorong penambahan jumlah SDM Pengelola di 7 TN	Bertambahnya jumlah SDM Pengelola di 7 TN	100 orang Pengelola di 7 TN			20	20	20	20	20		KemenPANRB	KLHK
		Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) tingkat nasional sebagai koordinator pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengelolaan Terpadu TN dan KKPN	Terbentuknya Pokja koordinator pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi implementasi RAN Pengelolaan Terpadu TN dan KKPN	1 Pokja	1								Kemenko Maritim	KKP, KLHK, Kemenpar, Kemenhub, KemenPU-PR, Kemendagri, KemenPPN/Bappenas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Agraria dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
														Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN), Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Badan Standardisasi Nasional (BSN), BIG, BMKG, LIPI, Pushidrosal
		Pembentukan Jejaring Kawasan Konservasi Perairan	Terbentuknya Jejaring Kawasan Konservasi Perairan	2 Nota Kesepahaman Bersama Jejaring Kawasan Konservasi Perairan	1 <i>Bird's Head Seascape</i> (BHS)	1 Lesser Sunda							Kemenko Maritim, KKP, KLHK	Kemendagri, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
5.	Penguatan Penelitian, Pengembangan, dan Diseminasi Informasi Konservasi dan Pemanfaatan Potensi Keanekaragaman Hayati Laut	Penelitian interdisiplin dan publikasi penelitian mengenai ekologi dan biota laut	Hasil penelitian interdisiplin dan publikasi penelitian mengenai konservasi keanekaragaman hayati laut	2 hasil penelitian interdisiplin dan publikasi penelitian setiap tahunnya	2	2	2	2	2	2	2	2	2	LIPI, BPPT	KLHK, KKP, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)
		Pembangunan dan operasionalisasi <i>Research Station</i> di 3 TN dan 3 KKPN	Terbangun dan beroperasinya <i>research station</i> di 3 TN dan 3 KKPN	1 <i>research station</i> di masing-masing 3 TN dan 3 KKPN		2 Wakatobi, Anambas	2 Cendrawasih, Raja Ampat	1 Laut Sawu	1 Taka Bonerate					LIPI	KKP, KLIHK, Kemristekdikti, Pemda
		Kajian valuasi ekonomi keanekaragaman hayati di 7 TN dan 10 KKPN	Hasil valuasi ekonomi keanekaragaman hayati di 7 TN dan 10 KKPN	17 kajian valuasi ekonomi secara tahunan (<i>multiyears</i>) selama 3 tahun di 7 TN dan 10 KKPN	2 TN Togean, Cendrawasih 2 KKPN Raja Ampat, Gili Matra	2 TN Bunken, Wakatobi 2 KKPN Laut Sawu, Anambas	2 TN Kep. Seribu, Taka Bonerate 2 KKPN Kapoposang, Banda	1 TN Karimunjawa 2 KKPN Pieh, Waigeo							KKP, KLHK, LIPI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Inventarisasi dan pemetaan sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang diperbarui secara berkala di 7 TN dan 10 KKPN	Tersedianya basis data (<i>database</i>) sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang diperbarui secara berkala di 7 TN dan 10 KKPN	1 basis data sumber daya hayati di setiap 7 TN dan 10 KKPN	17	17 <i>updating</i>	17 <i>updating</i>	17 <i>updating</i>	17 <i>updating</i>	17 <i>updating</i>	17 <i>updating</i>	17 <i>updating</i>	KKP, KLHK	Kemenristekdikti, LIPI, Pemda
		Penelitian pengembangan teknologi peningkatan produktivitas dan pengolahan keanekaragaman hayati laut	Tersedianya teknologi peningkatan produktivitas dan pengolahan keanekaragaman hayati laut yang siap diterapkan kepada masyarakat	4 teknologi peningkatan produktivitas dan pengolahan keanekaragaman hayati laut		1		1		1		1	BPPT	KKP, KLHK, Kemenristekdikti, LIPI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-13-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Diseminasi informasi keanekaragaman hayati untuk kepentingan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan	Tersedianya materi diseminasi informasi keanekaragaman hayati untuk kepentingan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan	1 materi diseminasi informasi keanekaragaman hayati untuk kepentingan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan di setiap 7 TN dan 10 KKPN (per tahun)	17	17	17	17	17	17	17	17	KKP, KLHK, LIPI	Kemenpar, Pemda
		Pembaruan data dan pemetaan potensi kawasan secara menyeluruh	Terbaruinya data dan pemetaan potensi kawasan secara menyeluruh setiap tahun	1 set data dan pemetaan potensi kawasan per tahun di setiap 7 TN dan 10 KKPN	17	17 <i>updating</i>	17 <i>updating</i>	17 <i>updating</i>	17 <i>updating</i>	17 <i>updating</i>	17 <i>updating</i>	17 <i>updating</i>	BIG, KLHK, KKP	Kemenpar, Kemen ATR/BPN, LIPI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
6.	Pembangunan Infrastruktur Strategis	Pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman	Tersedianya infrastruktur kawasan pariwisata	15 paket infrastruktur kawasan pariwisata	2 Kep. Seribu, Raja Ampat		3 Wakato-bi, Pieh, Gili Matra	2 Bunaken, Kapo-posang	2 Karimunjawa, Pieh	2 Cendrawasih, Laut Sawu	2 Taka Bonerate, Padaido	2 Togean, Banda	KemenPUPR	KLHK, KKP, Kemen-ATR/BPN, Pemda
			Tersedianya infrastruktur berbasis masyarakat	16 kawasan berbasis masyarakat	1 Kep. Seribu		3 Karimunjawa, Anambas, Laut Sawu	3 Wakato-bi, Waigeo, Pieh	3 Togean, Raja Ampat, Kapo-posang	2 Taka Bonerate, Gili Matra	2 Bunaken, Banda	2 Cendrawasih, Padaido	KemenPUPR	KLHK, KKP, Kemen-ATR/BPN, Pemda
			Terwujudnya peningkatan kualitas permukiman kumuh	15 kawasan	1 Wakato-bi		3 Cendrawasih, Banda, Laut Sawu	2 Togean, Anambas	3 Taka Bonerate, Waigeo, Raja Ampat	2 Bunaken, Kapo-posang	2 Karimunjawa, Padaido	2 Kep. Seribu, Gili Matra	KemenPUPR	KLHK, KKP, Kemen-ATR/BPN, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-15-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman	Tersedianya Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal	13 unit IPAL Komunal			3 Karimunjawa, Gili Matra, Anambas	2 Kep. Seribu, Waigeo	2 Bunaken, Togean, Raja Ampat	2 Wakotobi, Laut Sawu	2 Cendrawasih, Padaido	2 Taka Bonerate, Banda	KemenPUPR, KLHK, KKP	Kemen-ATR/BPN, BPPT, Pemda
			Tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (3R)	15 unit TPS 3R		1 Wakotobi	3 Kep. Seribu, Gili Matra, Waigeo	3 Karimunjawa, Anambas, Kapopang	2 Bunaken, Raja Ampat	2 Taka Bonerate, Laut Sawu	2 Cendrawasih, Padaido	2 Togean, Banda	KemenPUPR, KLHK, KKP	Kemen-ATR/ BPN, Pemda
			Tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	15 unit TPA	1 Gili Matra	3 Anambas, Togean, Raja Ampat	2 Bunaken, Waigeo	2 Taka Bonerate, Padaido	2 Cendrawasih, Banda	2 Karimunjawa, Kapopang	2 Kep. Seribu, Aru	1 Pieh	KemenPUPR	KLHK, KKP, Kemen-ATR/ BPN, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-16-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Tersedianya Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST)	15 unit TPST	1 Gili Matra	1 Gili Matra	2 Cendrawasih, Anambas	3 Karimunjawa, Bunaken, Kapoposang	2 Wakatobi, Padaido	2 Taka Bonerate, Banda	2 Togean, Raja Ampat	2 Kep. Seribu, Laut Sawu	KemenPUPR, KLHK, KKP	Kemen-ATR/BPN, Pemda
			Terlaksananya pembangunan/ penanganan sanitasi	16 paket	1 Kep. Seribu		3 Bunaken, Gili Matra, Waigeo	3 Karimunjawa, Anambas, Kapoposang	3 Taka Bonerate, Kep. Seribu, Raja Ampat	2 Cendrawasih, Laut Sawu	2 Togean, Padaido	2 Wakatobi, Banda	KemenPUPR	KLHK, KKP, Kemen-ATR/BPN, Pemda
			Tersedianya sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas)	15 paket Sanimas	1 Cendrawasih		3 Togean, Gili Matra, Waigeo	3 Taka Bonerate, Anambas, Kapoposang	2 Wakatobi, Raja Ampat	2 Kep. Seribu, Laut Sawu	2 Karimunjawa, Padaido	2 Kep. Seribu, Banda	KemenPUPR	KLHK, KKP, Kemen-ATR/BPN, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-17-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Pengembangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	16 unit IPAL	1 Gili Matra	1 Wakatoobi	3 Kep. Seribu, Gili Matra, Waigeo	3 Karimun Jawa, Anambas, Kapoposang	2 Taka Bonerate, Raja Ampat	2 Bunaken, Laut Sawu	2 Togean, Padaido	2 Cendrawasih, Banda	KemenPUPR, KLHK, KKP	Kemen-ATR/BPN, BPPT, Pemda
			Tersedianya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 7 TN	7 unit IPLT	1 Togean		1 Bunaken	1 Karimun Jawa	1 Kep. Seribu	1 Cendrawasih	1 Taka Bonerate	1 Wakatoobi	KemenPUPR, KLHK, KKP	Kemen-ATR/BPN, Pemda
		Pembinaan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan	Terlaksananya penataan kawasan destinasi wisata	15 kawasan destinasi wisata	1 Wakatoobi	2 Togean, Raja Ampat	2 Cendrawasih, Gili Matra, Waigeo	3 Kep. Seribu, Anambas, Kapoposang	2 Taka Bonerate, Pieh	2 Karimun Jawa, Laut Sawu	2 Bunaken, Padaido	1 Banda	KemenPUPR	KLHK, KKP, Kemen-ATR/ BPN, Pemda
			Terlaksananya pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan	13 kawasan		1 Wakatoobi	2 Taka Bonerate, Gili Matra	2 Cendrawasih, Laut Sawu	2 Togean, Banda	2 Bunaken, Anambas	2 Karimun Jawa, Kapoposang	2 Kep. Seribu, Padaido	KemenPUPR, KLHK, KKP	Kemen-ATR/BPN, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Tertatanya kawasan khusus nelayan	13 kawasan khusus nelayan		2 Raja Ampat, Padaido	2 Wakotobi, Anambas	2 Bunaken, Kapoposang	2 Karimunjawa, Banda	2 Taka Bonerate, Cendrawasih, Laut Sawu	2 Kep. Seribu, Aru	1 Togean	KemenPUPR	KKP, KLHK, Kemen-ATR/ BPN Pemda
		Pembinaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Terwujudnya optimalisasi SPAM Ibukota Kecamatan (SPAM IKK)	16 SPAM IKK	3 Cendrawasih, Togean, Anambas	2 Wakotobi, Gili Matra	2 Wakotobi, Waigeo	2 Kep. Seribu, Kapoposang	2 Karimunjawa, Raja Ampat	2 Taka Bonerate, Laut Sawu	2 Bunaken, Padaido	1 Banda	KemenPUPR	KLHK, KKP, Pemda
			Tersedianya SPAM	15 unit SPAM	4 Kep. Seribu, Wakotobi, Cendrawasih, Raja Ampat		3 Togean, Gili Matra, Waigeo	2 Bunaken, Anambas	2 Taka Bonerate, Kapoposang	2 Karimunjawa, Laut Sawu	1 Padaido	1 Banda	KemenPUPR	KLHK, KKP, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air (IPA)	16 unit IPA		1 Raja Ampat	3 Togean, Gili Matra, Waigeo	3 Bunaken, Anambas, Kapoposang	3 Karimunjawa, Kep. Seribu, Raja Ampat	2 Taka Bonerate, Laut Sawu	2 Wakatobi, Padaido	2 Cendrawasih, Banda	KemenPUPR	KLHK, KKP, Pemda
		Pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) rumah umum	7 paket bantuan PSU rumah umum			1 Togean	1 Kep. Seribu	1 Karimunjawa	2 Taka Bonerate, Bunaken	1 Wakatobi	1 Cendrawasih	KemenPUPR	KLHK, KKP, Pemda
		Pemberdayaan perumahan swadaya	Terlaksananya bantuan stimulan perumahan swadaya	7 paket bantuan stimulan perumahan swadaya			1 Kep. Seribu	1 Karimunjawa	2 Bunaken, Wakatobi	1 Taka Bonerate	1 Togean	1 Cendrawasih	KemenPUPR	KLHK, KKP, Pemda
		Penyediaan rumah khusus	Terbangunnya rumah khusus nelayan	7 paket			1 Togean	1 Kep. Seribu	1 Karimunjawa	2 Taka Bonerate, Bunaken	1 Wakatobi	1 Cendrawasih	KemenPUPR	KLHK, KKP, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Pelaksanaan preservasi dan peningkatan jalan nasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin dan rehabilitasi/rekonstruksi jalan	25 paket rehabilitasi/rekonstruksi jalan	5 Togean, Wakatobi, Bunaken, Anambas, Raja Ampat	5 Togean, Wakatobi, Bunaken, Anambas, Raja Ampat	5 Karimunjawa, Takabonerate, Kep. Seribu, Gili Matra, Laut Sawu	4 Cendrawasih, Kep. Seribu, Karimunjawa, Banda	3 Taka Bonerate, Cendrawasih, Wakatobi	3 Togean, Bunaken, Takabonerate			KemenPUPR	KLHK, KKP, Pemda
			Tersedianya jalan akses pelabuhan dan bandara	10 paket jalan akses pelabuhan dan bandara	5 Togean, Wakatobi, Bunaken, Anambas, Raja Ampat		2 Cendrawasih, Banda	1 Taka Bonerate	1 Kep. Seribu	1 Karimunjawa			KemenPUPR	KLIHK, KKP, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-21-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Penyediaan dan pengolahan air tanah dan air baku	Terbangunnya penyediaan air baku	13 paket air baku	1 Wakatobi		3 Togeang, Laut Sawu, Kapoposang	3 Kep. Seribu, Aru, Raja Ampat	3 Karimunjawa, Waigeo, Padaido	1 Taka Bone-rate	1 Bunaken	1 Cendrawasih	KemenPUPR	KLHK, KKP, Pemda
7.	Pembangunan dan Pengembangan Akses Transportasi dan Telekomunikasi ke Kawasan TN dan KKPN	Pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi serta pengoperasian sarana dan prasarana transportasi di 7 TN dan 10 KKPN	Terbangunnya pelabuhan/dermaga di lokasi terdekat dengan TN dan KKPN	21 unit pelabuhan/dermaga	1 unit (Pelabuhan Laut Batu Atas Wakatobi)	4 unit (Pelabuhan Padaido, Pelabuhan Saunek, Dermaga Raja Ampat, Dermaga Penyeberangan Waigeo)	4 unit (Cendrawasih) dan 2 unit (Gili Matra, Waigeo)	4 unit (Bunaken) dan 2 unit (Laut Sawu, Padaido)	2 unit (Kapotposang, Raja Ampat)	2 unit (Taka Bone-rate, Banda)			Kemenhub	KLHK, KKP, KemenPUPR, Pemda
			Peningkatan layanan penerbangan menuju TN dan KKPN	3 trayek penerbangan /bandara perintis			1 Anambas	1 Banda	1 Taka Bone-rate				Kemenhub	KLHK, KKP, KemenPUPR, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Terbukanya trayek baru kapal perintis	3 trayek baru kapal perintis			1 Kapo- posang	1 Aru	1 Padaido				Kemenhub	KLHK, KKP, Kemen- PUPR, Pemda
			Pelayanan angkutan jalan perintis	8 trayek angkutan jalan perintis	2 Taka Bo- nerate 1 Togean 1 Gili Matra 2 Raja Ampat 2 Waigeo								Kemenhub	KLHK, KKP, Kemen- PUPR, Pemda
		Pengembangan akses telekomunikasi di 7 TN dan 10 KKPN	Terbangunnya sarana prasarana telekomunikasi di 1 TN dan 6 KKPN	7 paket sarana prasarana telekomunikasi			3 Taka Bo- nerate, Laut Sawu, Kapo- posang	2 Aru, Raja Ampat	2 Waigeo, Padaido				Kemenkominfo	KLHK, KKP, Kemendag- ri, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Pengembangan jaringan listrik	Tersedianya jaringan listrik di KKPN	6 paket jaringan listrik			2 Laut Sawu, Kapo-posang	2 Aru, Raja Ampat	2 Waigeo, Padaido				KemenESDM	KKP, Kemendagri, Pemda, BUMN	
8.	Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk Perikanan Berkelanjutan	Estimasi stok ikan ekonomis penting di 7 TN dan 10 KKPN	Teridentifikasinya jumlah stok ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTb) di 7 TN dan 10 KKPN (khusus di zona pemanfaatan yang diperbolehkan sesuai dengan aturan)	17 Dokumen	3 TN Cendrawasih, Togeana, Taka Bonerate	4 TN Wakatobi, Bunaken, Karimunjawa, Kep. Seribu						3 TN Cendrawasih, Togeana, Taka Bonerate	4 TN Wakatobi, Bunaken, Karimunjawa, Kep. Seribu	KKP, KLHK	Kemenristekdikti, LIPI, Pemda
					5 KKPN Raja Ampat, Gili Matra, Laut Sawu, Kapo-posang, Aru	5 KKPN Waigeo, Padaido, Aru, Banda, Anambas						5 KKPN Raja Ampat, Gili Matra, Laut Sawu, Kapo-posang, Aru	5 KKPN Waigeo, Padaido, Aru, Banda, Anambas		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Pemanfaatan perikanan berkelanjutan di 7 TN dan 8 KKPN	Terbentuknya kemitraan dalam pemanfaatan perikanan berkelanjutan di 7 TN dan 8 KKPN (tidak termasuk Aru dan Pieh)	15 kemitraan dengan masyarakat	2 Kep. Seribu, Anambas	4 Bunaken, Wakatobi, Banda, Raja Ampat	5 Karimunjawa, Taka Bonerate, Togean, Cendrawasih, Gili Matra	1 Kapo-posang	1 Laut Sawu	1 Padaido	1 Waigeo		KKP, KLHK	Kemenristekdikti, LIPI, Pemda
9	Pengendalian Sampah dan Limbah	Penyusunan regulasi tentang pengelolaan sampah plastik di laut	Tersusunnya Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Sampah Plastik di Laut	1 Peraturan Presiden	1								Kemenko Maritim	KKP, KLHK, KemenPUPR, Sekretariat Kabinet (Setkab), LIPI, Pemda
		Pembangunan sistem pengendalian sampah di 7 TN dan 6 KKPN	Tersedianya sistem pengendalian sampah di 7 TN dan 6 KKPN	1 sistem pengendalian sampah di masing-masing 7 TN dan 6 KKPN		3 Kep. Seribu, Karimunjawa, Bunaken	6 Taka Bonerate, Wakatobi, Togean, Cendrawasih, Gili Matra, Laut Sawu	3 Kapo-posang, Banda, Raja Ampat	1 Waigeo					KLHK, KKP, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-26-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
10.	Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Pembangunan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) dampak perubahan iklim terhadap ekosistem kawasan	Tersedianya sistem peringatan dini dampak perubahan iklim di 7 TN dan 10 KKPN	1 sistem peringatan dini perubahan iklim di setiap 7 TN dan 10 KKPN	1 TN Cendrawasih	1 TN Togean	1 TN Bunaken	2 TN Wakotobi, Taka Bonerate	2 TN Karimunjawa, Kep. Seribu				BMKG, KLHK, KKP	Kemenko Maritim, LAPAN, TNI AL, Bakamla, LIPI, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
		Pelaksanaan kampanye kepada masyarakat (<i>Communication Education Public Awareness</i>)	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai dampak perubahan iklim terhadap ekosistem TN dan KKPN	3 kegiatan kampanye setiap tahun di setiap 7 TN dan 10 KKPN		51	51	51	51	51	51	51	KKP, KLHK	Kemenko Maritim, LIPI
		Pemulihan kerusakan ekosistem di-TN dan KKPN (di luar ekosistem mangrove)	Terpulihkannya ekosistem di TN dan KKPN (di luar ekosistem mangrove)	20 ha per tahun	20	20	20	20	20	20	20	20	20	KKP, KLHK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-27-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
11	Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan Status Internasional (Cagar Biosfer)	Penguatan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi kawasan dengan status Cagar Biosfer <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i> (UNESCO)	Tersedianya dokumen <i>Periodic Review</i> Cagar Biosfer sebagai bahan evaluasi 10 tahunan oleh UNESCO	2 dokumen <i>Periodic Review</i>					1 Waka-tobi			1 Taka Bonerate	LIPI	KLHK, KKP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kemenristekdikti, Kemendagri, Pemda
		Pengusulan kawasan menjadi Cagar Biosfer yang ditetapkan oleh UNESCO	Usulan kawasan yang ditetapkan menjadi Cagar Biosfer UNESCO	1 dokumen usulan penetapan Cagar Biosfer UNESCO		1 Togean								LIPI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-28-

STRATEGI 2. PENGEMBANGAN PERAN TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL DALAM Mendukung PARIWISATA

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Pembangunan Infrastruktur Wisata Bahari	Pengadaan dan peningkatan sarana wisata di 7 TN dan 10 KKPN sesuai peraturan yang berlaku dan daya dukung	Tersedianya sarana wisata yang memadai di 7 TN dan 10 KKPN	1 paket sarana wisata per tahun di masing-masing kawasan TN dan KKPN	7 (hanya di 7 TN)	17	17	17	17	17	17	17	17	KLHK, KKP	Kemen-PUPR, Kemenpar, Kemenhub, Pemda
		Pembangunan dan peningkatan prasarana wisata di 7 TN dan 10 KKPN	Tersedianya prasarana wisata yang memadai di 7 TN dan 10 KKPN	1 paket prasarana wisata per tahun di setiap kawasan TN dan KKPN	7 (hanya di 7 TN)	17	17	17	17	17	17	17	17	KLHK, KKP, Kemenpar	Kemen-PUPR, Kemenhub, Pemda
2.	Perencanaan Pengembangan Wisata Bahari	Penyusunan pedoman umum dan <i>visitor management</i> bagi pengembangan wisata bahari berkelanjutan	Tersedianya pedoman umum pengembangan wisata bahari berkelanjutan	1 Peraturan Menteri Pariwisata		1								Kemenpar, KKP, KLHK	Kemenko Maritim, Kemenhub, LIPI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-29-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Penyusunan dan pengesahan rencana induk ekowisata di TN dan rencana teknis pemanfaatan kawasan di KKPN	Tersedianya dokumen rencana induk ekowisata di TN dan rencana teknis pemanfaatan kawasan di KKPN	1 dokumen rencana induk ekowisata di TN dan rencana teknis pemanfaatan kawasan di KKPN		17							KLHK, KKP	Kemenpar, Pemda
		Penyusunan dan pengesahan desain tapak dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) di TN dan rencana teknis pemanfaatan kawasan di KKPN	Tersedianya dokumen desain tapak dan DED di TN dan rencana teknis pemanfaatan kawasan di KKPN	1 dokumen desain tapak dan DED di masing-masing 7 TN dan 1 dokumen rencana teknis pemanfaatan kawasan di 10 KKPN			17						KLHK, KKP	Kemenpar, Pemda
		Penyusunan peta objek wisata dan aksesibilitas di TN dan KKPN	Tersedianya peta objek wisata di TN dan KKPN	Peta objek wisata di 7 TN dan 10 KKPN		17							KLHK, KKP	Kemenpar, Pushidrosal, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-30-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Kajian daya dukung (<i>carrying capacity</i>) wisata bahari di 7 TN dan 10 KKPN	Tersedianya kajian daya dukung wisata bahari di 7 TN dan 10 KKPN	17 dokumen kajian daya dukung wisata bahari di 7 TN dan 10 KKPN		17							Kemenpar, KLHK, KKP	Kemendagri, Pemda
3.	Penguatan Kapasitas Pengelolaan Wisata Alam termasuk Pengelolaan Sampah dan Limbah	Pelatihan pengelolaan ekowisata bagi SDM TN dan KKPN	Tersedianya SDM pengelola wisata yang terlatih	102 pelatihan	34		34		34				KLHK, KKP, Kemenpar	Pemda
		Pelatihan untuk unit pengelola sampah dan limbah wisata alam	Tersedianya unit khusus yang mampu mengelola sampah dan limbah wisata alam	102 pelatihan	34		34		34				KLHK, KKP	Kemenpar, Pemda
4.	Peningkatan Pemasaran dan Pengembangan Bisnis Wisata	Penyelenggaraan <i>event</i> /festival dalam rangka meningkatkan promosi wisata di 7 TN dan 10 KKPN	Meningkatnya promosi wisata di 7 TN dan 10 KKPN	112 <i>event</i> /festival wisata	7 TN	7 TN dan 2 KKPN	7 TN dan 4 KKPN	7 TN dan 10 KKPN	7 TN dan 10 KKPN	7 TN dan 10 KKPN	7 TN dan 10 KKPN	7 TN dan 10 KKPN	Kemenpar	KLHK, KKP, Pemda
							Gili Matra, Laut Sawu, Raja Ampat, Banda							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-31-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		<i>Integrated media online</i> untuk promosi dan pemasaran pariwisata di 7 TN dan 10 KKPN	Tersedianya <i>integrated media online</i> untuk promosi dan pemasaran pariwisata di 7 TN dan 10 KKPN	1 Situs	1								Kemenpar	KLHK, KKP
		Pembuatan media promosi pariwisata	Media promosi pariwisata di 7 TN dan 10 KKPN	1 paket media promosi per tahun di setiap TN dan KKPN	17	17	17	17	17	17	17	17	Kemenpar, KKP, KLHK	Kemenkominfo, Pemda
		Penyusunan buku informasi TN dan KKPN	Tersedianya buku informasi TN dan KKPN	17 buku informasi	17			17				17	KKP, KLHK	Pemda
		Mendorong investasi di bidang pariwisata berkelanjutan	Terbitnya Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di 7 TN dan Surat Izin Pengelolaan Pariwisata Alam Perairan di 10 KKPN	17 Izin Pengusahaan Pariwisata Alam dan Surat Izin Pengelolaan Pariwisata Alam Perairan		9		8					KLHK, KKP	Kemenpar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-32-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
5.	Kerja Sama dan Pelibatan Stakeholder (Partnership and Stakeholders Engagement)	Sistem sertifikasi perusahaan pariwisata alam	Tersedianya pedoman sertifikasi perusahaan pariwisata alam	1 pedoman sertifikasi perusahaan pariwisata alam			1						BSN	Kemenpar
			Tersertifikasinya perusahaan pariwisata alam berdasarkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di 7 TN dan 10 KKPN	50 perusahaan yang tersertifikasi				5	5	10	15	15	BSN	Kemenko Maritim, KLHK, KKP, Kemenpar
		Pengelolaan ekowisata bahari berbasis masyarakat	Tersusunnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan kelompok masyarakat di 7 TN dan 10 KKPN	17 Perjanjian Kerja Sama (PKS)		10	7							KKP, KLHK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-33-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Penandatanganan perjanjian kerja sama dengan mitra agen, operator, dan amenitas wisata yang aktif dan operasional di 7 TN dan 10 KKPN	Disetujuinya perjanjian kerja sama dengan mitra agen, operator, dan amenitas wisata yang aktif dan operasional	17 perjanjian kerja sama		7	10						KLHK, KKP	Kemenpar, Pemda
		Pembangunan jejaring kerja sama pengembangan ekonomi produktif desa sekitar pada 7 TN dan 10 KKPN	Terbentuknya jejaring kerja sama dalam rangka pengembangan ekonomi produktif desa sekitar pada 7 TN dan 10 KKPN	1 jejaring kerja sama di masing-masing 7 TN dan 10 KKPN		3	5	9					KLHK, KKP	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDT), Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-34-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Pemantauan pelaksanaan kerja sama kemitraan usaha ekonomi masyarakat di kawasan konservasi	Terlaksananya pemantauan tahunan tentang pelaksanaan kerja sama kemitraan usaha ekonomi masyarakat di kawasan konservasi di 7 TN dan 10 KKPN	1 laporan pemantauan per tahun di masing-masing UPT (7 TN dan 10 KKPN)		17	17	17	17	17	17	17	KLHK, KKP	Kemenkop-UKM, Kemendes-PDT, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-35-

STRATEGI 3. PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN PARA PIHAK DI SEKITAR TAMAN NASIONAL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Pemetaan Partisipatif Ruang Kelola Masyarakat	Identifikasi potensi Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Tersedianya data potensi SDA dan peta lokasi pemanfaatan kawasan perairan yang dimanfaatkan oleh masyarakat	17 dokumen data potensi SDA dan peta lokasi		7 TN	10 KKPN						KLHK, KKP, BIG	Kemenkop-UKM, Kemen-desPDT, Pemda
		Identifikasi potensi SDA dan ekonomi desa	Tersedianya dokumen data potensi SDA dan ekonomi desa, serta rekomendasi usaha ekonomi yang perlu dikembangkan oleh desa sesuai potensi yang dimiliki	17 dokumen data potensi SDA dan ekonomi desa			7 TN	10 KKPN					KLHK, KKP, BIG	Kemenkop-UKM, Kemen-desPDT, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-36-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2.	Harmonisasi Pengelolaan Kawasan dengan Masyarakat Hukum Adat	Penetapan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA	Pelibatan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA	10 SK Bupati/Walikota tentang masyarakat hukum adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA	2 Wakato- bi, Padaido	2 Cendra- wasih, Raja Ampat	2 Karimun- jawa, Banda	1 Buna- ken	1 Togean	1 Kep. Seribu	1 Taka Bo- nerate		Pemda, KLHK, KKP	Kemendagri, Kemen-ATR/BPN, Kementerian Pertanian (Kementan), Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri
3.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat pada Bidang Wisata	Pelatihan pemandu wisata dan interpreter bagi kelompok masyarakat	Terlaksananya pelatihan untuk pemandu wisata dan interpreter dari masyarakat yang tersertifikasi di 7 TN dan 10 KKPN	1 pelatihan per tahun di tiap UPT	17	17	17	17	17	17	17	17	Kemenpar, KLHK, KKP	Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri, Pemda
		Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan	70 orang per tahun	70	70	70	70	70	70	70	70	70	Kemenpar, KLHK, KKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-37-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Pengembangan pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat	Disepakatinya perjanjian kerja sama pengelolaan wisata alam berbasis masyarakat	1 perjanjian kerja sama di masing-masing 7 TN dan 10 KKPN	17								KLHK, KKP	Kemenpar, Kemenkop-UKM, Kemendes-PDT, Pemda
		Pengembangan <i>homestay</i> , kuliner, dan suvenir yang dikelola masyarakat	Meningkatnya jumlah <i>homestay</i> , kuliner, dan suvenir berkualitas yang dikelola masyarakat	50 unit per tahun	50	50	50	50	50	50	50	50	Kemenpar	KLHK, KKP, Kemenkop-UKM, Kemendes-PDT, Pemda
		Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) bidang wisata	Terlaksananya pembinaan KUB wisata	136 kelompok	34		34		34		34		Kemenkop-UKM	KLHK, KKP, Kemenpar, Kemendes-PDT, Pemda
4.	Pendampingan Masyarakat dalam Budi-Daya Spesies Bernilai Ekonomi Tinggi	Pendampingan masyarakat dalam budidaya spesies bernilai ekonomi tinggi	Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat dalam budidaya spesies ekonomi tinggi	238 kelompok		34	34	34	34	34	34	34	KLHK, KKP	Kemenkop-UKM, Kemendes-PDT, Kementerian Perdagangan (Kemendag), LIPI, Pemda



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-38-

STRATEGI 4: PENGEMBANGAN MEKANISME PENDANAAN BERKELANJUTAN

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Penyusunan Strategi Pendanaan Berkelanjutan	Identifikasi kebutuhan dan sumber pendanaan bagi peningkatan kinerja pengelolaan dan pariwisata di TN dan KKPN	Teridentifikasinya jumlah kebutuhan pendanaan dan data sumber pendanaan bagi peningkatan kinerja pengelolaan dan pariwisata di TN dan KKPN	1 dokumen		1								Kemenko Maritim	KLHK, KKP, Kemenkeu, KemenPPN/ Bappenas
		Pembentukan <i>endowment fund</i> dan <i>trust fund</i> konservasi laut	Terbentuknya <i>endowment fund</i> dan <i>trust fund</i> konservasi laut	1 unit <i>endowment fund</i> dan <i>trust fund</i> konservasi laut		1								KKP	KemenPPN/ Bappenas, Kemenkeu, KLHK, Pemda
		Pembentukan sistem manajemen pendanaan berkelanjutan	Terbentuknya sistem manajemen pendanaan berkelanjutan	1 sistem pendanaan berkelanjutan			1							Kemenkeu	KLHK, KKP, KemenPPN/ Bappenas
		Identifikasi peluang <i>Public Private Partnership</i> (PPP) terkait pariwisata di 7 TN dan 10 KKPN	Teridentifikasinya jumlah peluang PPP yang bisa ditindaklanjuti di 7 TN dan 10 KKPN	1 dokumen			1							Kemenkeu	KLHK, KKP, Kemenpar, KemenPPN/ Bappenas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-39-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2.	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di 7 TN dan 10 KKPN	Tersinkronisanya perencanaan dan penganggaran program di 7 TN dan 10 KKPN	7 dokumen program		1	1	1	1	1	1	1	KemenPPN/Beppenas	Kemenkeu, KLHK, KKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-40-

STRATEGI 5: PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BARU

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu								Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Penambahan Luas Kawasan Konservasi Perairan Baru	Meningkatkan luas kawasan konservasi perairan baru (menuju target 2030 seluas 30 juta ha)	Tercapainya penambahan luas kawasan konservasi perairan baru sebesar 5,9 juta ha	5,9 juta ha	700 ribu Ha	700 ribu Ha	700 ribu Ha	700 ribu Ha	700 ribu Ha	800 ribu Ha	800 ribu Ha	800 ribu Ha	KKP	Kemendagri, Pemda	
		Identifikasi dan penilaian potensi calon kawasan konservasi	Teridentifikasinya potensi SDA Hayati dan Non Hayati	32 Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4	4	KKP, Pemda	Kemendagri, LIPI, BIG, Pushidrosal
		Pencadangan calon kawasan konservasi	Tercadangkannya kawasan konservasi perairan baru	10 SK Menteri/Gubernur tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan	2	2	1	1	1	1	1	1	1	KKP, Pemda	Kemendagri
2.	Penetapan Kawasan Konservasi	Pembentukan lembaga pengelola kawasan	Terbentuknya lembaga pengelola kawasan konservasi perairan	7 Peraturan Menteri/Gubernur tentang Lembaga Pengelola Kawasan Konservasi Perairan		1	1	1	1	1	1	1	KKP, Pemda	Kemendagri	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-41-

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Target /Output	Jangka Waktu							Penanggung Jawab	Instansi Terkait	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi	Tersusunnya rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan	8 dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan	1	1	1	1	1	1	1	1	KKP, Pemda	Kemendagri, LIPI, BIG, Pushidrosal
		Penetapan kawasan konservasi	Ditetapkannya kawasan konservasi oleh Menteri	8 SK Menteri KP tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan	1	1	1	1	1	1	1	1	KKP	Pemda

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kemaritiman,



Agustina Murbaningsih